

TONDANO 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PENDIDIKAN

**Kata Pengantar**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 mempunyai arti strategis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini telah merangkum seluruh kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah (APBD), DAU dan DAK yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2021 serta kegiatan yang bersumber dari dana APBN.

Sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2021.

Akhirnya semoga LKjIP Tahun anggaran 2021 ini memberikan konstribusi bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) di Kabupaten Minahasa lebih khusus di lingkungan Dinas pendidikan.

Tondano

Plh. KEPALA DINAS,

HANSJE T. WUWUNGAN, S.Pd, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19661112199103 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................ ii

**IKHTISAR EKSEKUTIF** .............................................................................1

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 3

I. GAMBARAN SINGKAT …………............................................................... 4

II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR

ORGANISASI ........................................................................... 4

A. KEDUDUKAN ........................................................................... 4

B. TUGAS POKOK …........................................................................ 4

C. FUNGSI ........................................................................... 5

D. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................ 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………. ........................................ 10

I. RENCANA STRATEGI ................................................................ 10

A. VISI ……....................................................... 10

B. MISI ................................................................... 10

C. TUJUAN .................................................................... 11

II. PERJANJIAN KINERJA ……….......................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………............................................... 15

I. CAPAIAN KINERJA ................................................................. 16

A. CAPAIAN SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ........................... 16

B. CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR ........................................ 19

BAB IV PENUTUP .......................................................................... 25

III. HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN .......................................... 25

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa merupakan pemenuhan kewajiban dari mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima (terakhir) atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 Dinas Pendidikan yang telah diperjanjikan.

Dalam dokumen Renstra tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan mengacuh dari misi Pemerintah Kabupaten yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Kedua misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Dinas Pendidikan tahun 2021 adalah sebesar 100.3%. Dari sebanyak 14 IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2021 adalah sebesar 96,2%. Dari sebanyak 6 program Dinas Pendidikan, sebanyak 4 (96%) program capaian kinerja keuangannya sangat baik, 4 (87%) program capaian kinerja keuangannya baik, Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2021, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang perlu segera diselesaikan, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasanana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan antara lain program rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru, bantuan siswa miskin, beasiswa kepada siswa berbakat dan berprestasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan, pemberian tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Penyelesaikan permasalahan dan tantangan di bidang pendidikan tidak hanya dapat diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri tapi butuh dukungan dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu setiap orang baik dari internal Dinas Pendidikan maupun Eksternal diharapkan menjadi pengerak lingkungan sekitarnya dalam penyelesaian masalah.

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga Dinas Pendidikan dapat menjadi mercusuar dalam penyelesaian masalah pendidikan dan dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan secara baik dan akuntabel, sehingga visi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP-OPD), adalah dokumen pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen pelaksanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah, LKJIP Pendidikan mempunyai arti yang strategis dalam pelaksanaan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. LKjIP OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Pelaksanaan Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

2. LKjIP OPD merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatum dalam Pelaksanaan Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerahpada tahun 2021.

Dalam penyusunan LKjIP OPD diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan produk yang baik yaitu:

1. Persiapan Penyusunan LKjIP OPD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun LKJIP OPD, orientasi mengenai RKPD dan LKjIP OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP OPD
2. Orientasi mengenai LKjIP OPD
3. Penyusunan Agenda Kerja
4. Pengumpulan Data dan Informasi
5. Penyusunan Rancangan LKjIP OPD

LKjIP OPD adalah dokumen penilaian akhir kegiatan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan LKjIP OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: Tahap perumusan rancangan LKjIP OPD; dan Tahap penyajian rancangan LKjIP OPD.

Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Tahap Perumusan Rancangan LKjIP OPD

Perumusan rancangan LKjIP OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan LKjIP OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan LKjIP OPD, penyempurnaan rancangan LKjIP OPD, pembahasan forum OPD, dan penyesuaian dokumen rancangan LKjIP OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pelaksanaan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

1. Tahap Penyajian Rancangan LKjIP OPD

Penyajian rancangan LKjIP OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

1. Pelaksanaan Forum OPD
2. Penetapan LKjIP OPD

Dengan melihat arti strategis dokumen LKjIP OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen LKjIP OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2020 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 antara lain :

1. Pelaksanaan LKjIP tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam LKjIP harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam LKjIP OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam LKjIP dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yakni **“PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN KEWILAYAHAN**”.

1. **Gambaran Umum Instansi**

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Daerah serta Tata Kerja Dinas Pendidikan menguraikan :

1. Pelaksanaan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional dibidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Perencanaan penyediaan dan pengawasan sarana dan prasarana;
3. Perencanaan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar, PAUD/PNF dan PMPTK;
4. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
5. Pengkoordinasian, failitasi pelaksanaan perencanaan, pengakatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;
7. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menurut Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

 1. Kepala Dinas, yang mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 Fungsi Sekretaris adalah:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
5. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
6. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
7. Penyusunan perencanaan di jajaran dinas pendidikan kabupaten;
8. Penyusunan dan pengurusan serta pengevaluasian administrasi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta evaluasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
9. Pemrosesan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan di Dinas;
10. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai tenaga kependidikan
11. Pengevaluasian kepegawaian pada tenaga kependidikan
12. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai pada tenaga kependidikan;
13. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian pendidik yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiunan pegawai pada tenaga pendidik;
14. Pemrosesan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dinas;
15. Perumusan standar operasional prosedur kerja; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kurikulum SD/SMP, sarana prasarana dan kesiswaan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:

1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dasar
2. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Dikdas;
3. Perencanaan/fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
4. Perencanaan dan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar
5. Perencanaan sistem informasi pelaksanaan pendidikan dasar
6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dikdas;
7. Pelaksanaan pembinaan koordinasi, falisitasi Dikdas dengan instansi / lembaga terkait dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
8. Pelaksanaan evaluasi program dan rumusan sistem kurikulum, pengelolaan sarpras, pemberdayaan kelembagaan dan pengendalian mutu SD,PLB dan SMP;
9. Perumusan rencana dan program Dikdas;
10. Pembinaan dan memotivasi pegawai di lingkungan bidang Dikdas;
11. Pemerosesan pemberian rekomendasi / ijin pendirian serta pencabutan ijin operasianl dikdas;
12. Penyusunan pedoman penerimaan siswa baru (PSB);
13. Penyusunan laporan pelaksanaan Kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana dan prasarana SD dan SMP;
14. Penyusunan kurikulum mulok dan kalender pendidikan;
15. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan Akreditasi Sekolah;
16. Penyelenggaraan / fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional.

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, kelembagaan dan kesetaraan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:

1. Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
2. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, monev program Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan NonFormal;
3. Penyelenggaraan dan pengendalian penilaian hasil tahap akhir paket A, B, dan C;
4. Pengembangan standar isi keterampilan fungsional, kepribadian professional secara tematik dan konstriktif;
5. Pengembangan proses pembelajaran tuntas dan maju berkelanjutan secara induktif dan fungsional;
6. Pengembangan diversifikasi layanan sesuai kondisi, potensi dan karakteristik peserta didik dengan pengakuan terhadap kompetensi yang telah di miliki dan pembelajaran mandiri;
7. Peningkatan muatan kecakapan hidup (life skill) seluruh mata pelajaran paket B dan C yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP);
8. Perluasan akses paket A dan Paket B dalam mendukung penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun;
9. Perencanaan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A, B dan C;
10. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana dan prasarana PAUD, program kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan masyarakat;
11. Pelaksanaan penguatan tatakelola pelayanan pendidikan keaksaraan yang berkelanjutan serta lembaga satuan PNF penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
12. Penerapan pembelajaran PAUD PNF;
13. Penurunan jumlah penduduk penyandang buta aksara;
14. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan sasaran penyelengaraan program keaksaraan dan kesetaraan;
15. Pelaksanaan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan mitra kerja berbagai lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
16. Pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana PAUD, program kesetaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
17. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi, promosi, hasil pelaksanaan program lembaga PNF;
18. Pelaksanaan standarisasi dan akreditasi lembaga, taman bacaan masyarakat (TBM) dan PKBM;
19. Pembinaan dan pengembangan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
20. Penyelenggaraan, mengendalikan serta mengawasi Ujian Nasional Kursus PNF;
21. Pengadaan pembinaan lembaga kursus PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang mencakup aspek kelembagaan, tenaga pendidik dan peserta didik menurut jenis pendidikan;
22. Pemberian perizinan lembaga penyelenggaraan program PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat;
23. Pengadaan pendataan dan evaluasi lembaga kursus PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat;
24. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Seksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
25. Penelitian dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Penyebarluasan petunjuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Penyusunan petunjuk pelaksanaan wajib belajar, kurikulum, kalender pendidikan, evaluasi belajar sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
28. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dukungan teknis, administratif dan membina prasarana bidang;
29. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
30. Pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal;
31. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal.
32. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas menyelenggarakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:
33. Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK/PAUD, SD dan SMP;
34. Penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan tenaga kependidikan;
35. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik;
36. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penetapan angka kredit tenaga pendidik;
37. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
38. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
39. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan;
40. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Karier Tenaga Pendidik;
41. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
42. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
43. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan pembinaan teknis fungsional;
44. Penyusunan dan pengurusan serta pengevaluasian administrasi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta evaluasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
45. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai dan tenaga kependidikan.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD – SKB)

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa terdiri dari :

| No | Jabatan | Eselon | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas | II-b | 1 | Orang |
| 2 | Sekretaris Dinas | III-a | 1 | Orang |
| 3 | Kepala Bidang | III-b | 3 | Orang |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV-a | 2 | Orang |
| 5 | Kepala Seksi | IV-a | 9 | Orang |
| 6 | Kepala UPT Pendidikan Formal | IV-a | 25 | Orang |
| 7 | Kepala UPT Pendidikan Non Formal | IV-a | 6 | Orang |
| 8 | Kelompok Pengawas Sekolah | Fungsional | 46 | Orang |
| J u m l a h |  | 95 | Orang |

|  |
| --- |
| **STRUKTUR ORGANISASI** |
| **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **K E P A L A D I N A S** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H.TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MMPEMBINA Tk. INIP. 19661112 199103 1 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | **S E K R E T A R I S** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN |  |  |   | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | FERRY L. TULUNG, S.PdPENATA Tk. INIP. 19641002 199103 1 007 |  |  | RISKA M. SOLANG, S.PdPENATANIP. 19880304 201102 2 001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR** |  |  |  |  |  |  | **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  |  |  |  |  | **BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
| HENDRIE R. L. TOMPODUNG, S.PdPEMBINANIP. 19670814 198803 1 010 |   |  |  |  |   |  | Dra. FAITRIE F. SUMUAN, M.PdPEMBINA Tk. INIP. 19640215 199003 2 005 |   |  |  | FRANDKY S. WAWORUNTU, SH., MAP PEMBINANIP. 19800830 200003 1 001 |   |
|   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| SEKSI KURIKULUM DIKDAS |   |   |   |   |   |   | SEKSI KURIKULUM PAUD/PNF |   |  |  |  |  |  | SEKSI TENAGA TEKNIS PAUD/PNF |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| ALEX F. WANTANIA, S.Pd., M.Pd PEMBINA NIP. 19700511 199802 1 002 |   |   |   |   |   |   | FERRY DAROSSA, S.Pd., M.Pd PENATA Tk. I NIP. 19710804 200902 1 001 |   |  |  | Dra. SESKA L. GIROTHPENATANIP. 19650205 198603 2 022 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| SEKSI KELEMBAGAAN SARANA/PRASARANA |   |   |   |   |   |   | SEKSI PAUD DAN DIKMAS |   |  |  |  |  |  | SEKSI TENAGA TEKNIS SD |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| LANDI WOHON, S.Pd PENATA NIP. 19860530 200903 1 001 |   |  |  |  |   |  | JEFRY SARAPUNG PENATA MUDA Tk. I NIP. 19651008 199203 1 011 |   |  |  | STELLA V. KARAMOYPENATA MUDA Tk. INIP. 19640124 199203 2 004 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKSI KESISWAAN |   |   |   |   |   |   | SEKSI KELEMBAGAAN DAN KESETARAAN |   |  |  |  | SEKSI TENAGA TEKNIS SMP |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| VENTJE SANTIPENATA MUDA Tk. INIP. 19650205 198603 1 024 |  |   |   |   |   |   | REKI H. REMBET, SEPENATA Tk. INIP. 19691012 199903 1 012 |  |  |  | MIKY KUMONTOY, S.PdPENATA MUDANIP. 19760409201001 1 004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPT PENDIDIKAN NON FORMAL/SKB |  |

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran (RKA) Pendidikan tahun 2021.

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Laporan Akuntabilitas Kinerja(LKjIP) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2021, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**A. VISI DAN MISI**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikkan Kabupaten Minahasa. Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. VISI

**“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”**

1. MISI
	1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.
	3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
	4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
	5. Memantapkan Managemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pendidikan tahun 2018-2023. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Strategis OPD Tahun 2018 - 2023.

Sesuai dengan Rencana Startegis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa melaksanakan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional dan Pembangunan Daerah yang mengarah kepada Pelayanan Prima Pendidikan dengan Tujuan Strategis:

T1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

T2. Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan.

Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan menetapkan program dan kegiatan yang perlu ditingkatkan dan dicapai oleh Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal dalam rangka mencapai tujuan strategis tersebut.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik, maka perlu adanya penjabaran sasaran strategis pada rencana kinerja tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan dimulai dengan perumusan renstra yang berisi serangkaian target yang hendak dicapai dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pendidikan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Pendidikan berdasarkan Tujuan Strategis (T1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia memuat 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat
4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar
6. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal
7. Meningkatnya perwujudan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar

Sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa berdasarkan Tujuan Strategis (T2) Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan memuat 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik
2. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatnya perwujudan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar

Dinas Pendidikan sebagai pelaksanan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi mempunyai program “Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang disajikan pada beberapa tabel berikut.

**Tabel 1**

**RENCANA KINERJA**

**TAHUN 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indicator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik | Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan dan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan tugas teknis kantor | 4 |
| Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% |
| Peningkatan kebutuhan aparatur | 100% |
| Jumlah aturan dan peraturan yang relevan tersosialisasi | 100% |
| Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dan terdistribusi tepat waktu | 100% |
| 2 | Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 85,5% |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,85 |
| Angka Harapan Sekolah | 12,30 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,04 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,06 |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 99,9 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 99,9 |
| Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A | 93% |
| Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 60% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A | 95% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 93% |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 93% |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 60% |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar |  |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar |  |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar di PerKabupatenan |  |
| Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata |  |
| Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | 100% |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 100% |
| Sekolah PAUD kondisi bangunan baik | 100% |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 76% |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik |  |
| Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 79% |
|  |  | Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | 70% |
|  |  | Cakupan Perangkat Daerah Melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang mewujudkan SPM | 60% |
| 3 | Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Tingkat Kemiskinan |   |
|  | 7,15 |
|  |  | Cakupan perwujudan SPM bidang pendidikan | 100% |

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dinas dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Dinas

2. Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMD serta Sarana dan Prasarana Dinas

3. Penyediaan Layanan dan Pembinaan Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Dinas Terkait

4. Penyediaan Layanan Pengelolaan Anggaran yang Prima

5. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian yang Andal

6. Peningkatan Layanan Bidang Informasi dan Kehumasan

7. Penyediaan Data Pokok dan Statistik Pendidikan

**B. Perjanjian Kinerja**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas, dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Pihak yang terlibat di dalam penetapan kinerja dalam lingkungan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berkenaan dengan penetapan ini, seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung tujuan terjaminnya layanan prima sebagaimana rencana kinerja tahun 2021.

Pernyataan yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan Eselon III, secara rinci diuraikan substansi yang diperjanjikan berupa Kontrak Kinerja Tingkat Unit Utama Organisasi Pemerintah Daerah Eselon II Dinas Pendidikan, yaitu Kontrak Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Minahasa.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan. Adapun uraian pencapaian kinerja dikelompokkan ke dalam sebelas program sebagai berikut.

* + - * 1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menetapkan lima program pembangunan pendidikan seperti tercantum dalam dokumen rencana strategis. Pengelompokkan program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan serta dukungan manajemen. Lima program Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri atas:

* + - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
			2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
			3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
			4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
			5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis selama tahun 2021 Dinas Pendidikan yang dikelompokkan ke dalam program Dinas Pendidikan.

1. CAPAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam

menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan. Dalam melaksanakan

program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia pendidikan;
2. Penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan monitoring dan pelaporan di lingkungan pendidikan;
3. Penguatan sistem pencatatan di lingkungan pendidikan;

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum;
2. Peningkatan layanan prima pengadaan dan penataan barang milik Negara serta sarana prasarana;
3. Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas;
4. Penyediaan data, statistik dan informasi pendidikan;
5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
6. Pencapaian target dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

g) Peningkatan dan pembinaan, pengawasan yang akuntabel

h) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Pendidikan.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal (PAUD/PNF) diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas khususnya pada pendidikan usia dini, nonformal dan informal. Pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Keberhasilan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagai salah satu program Dinas Pendidikan, program pendidikan anak usia dini, Pendidikan nonformal ini dilaksanakan untuk mendukung dua tujuan strategis, yaitu:

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan;

b. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

c. Ketercapaian sasaran strategis program PAUDPNF, dimana ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indicator kinerja utama yang ada dalam program tersebut.

a). Meningkatnya APK PAUD

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan bagi tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU “Angka Partisipasi Kasar PAUD Pendidikan”. Sesuai dengan target rencana strategis 2018-2023, pada tahun 2021 atau awal periode rencana strategis 2018-2023 APK PAUD Dinas Pendidikan ditargetkan mencapai 85,5%. Dari target tersebut berhasil tercapai sebesar 63,81%. Dengan data capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis menurun APK PAUD pada tahun 2021. Namun demikian selama lima tahun terakhir APK PAUD Dinas Pendidikan mengalami fluktuatif terjadi peningkatan dan penurunan, hal itu terlihat dari APK PAUD sebesar 69.25% pada tahun 2019, meningkat menjadi 69.75% pada tahun 2020, pada tahun 2021 menurun menjadi 63,81%.

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 tingkat pencapaian IKU “APK PAUD Pendidikan” belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini baru mencapai 63, 81% dari target yang ditetapkan sebesar 85,5%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 74,63%. Dibandingkan tahun 2020, capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,17% dari tahun sebelumnya yaitu 74,63%. Ketidaktercapaian target tersebut, dikarenakan alokasi anggaran pemberian bantuan operasional penyelenggaran (BOP) PAUD belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun target APK tahun 2021 tidak tercapai, namun demikian pemerintah tetap meberikan stimulus program-program untuk masyarakat. Hal itu ditandai dengan makin banyaknya kontribusi masyarakat melalui swadaya mendirikan lembaga-lembaga PAUD di desa-desa yang belum ada PAUD-nya.

Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah terobosan telah dilakukan:

* 1. Menyempurnakan penyusunan Kurikulum 2013 PAUD dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 146 tahun 2014, dan pelaksanaan TOT bagi pelaksanaan kurikulum 2013 PAUD;
	2. Penyusunan Kebijakan Wajib PAUD untuk anak usia 5-6 tahun, dan pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan Wajib PAUD;
	3. Sosialisasi program PAUD pada pemerintah kecamatan.

b). Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan, kecakapan hidup melalui kursus dan pelatihan

Meningkatnya layanan pendidikan kecakapan hidup melalui kursus dan pelatihan merupakan sasaran strategis untuk mendukung tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan bagi orang dewasa. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU “Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan”. Sesuai dengan target rencana strategis 2018-2023, pada tahun 2021 layanan pendidikan kecakapan hidup melalui kursus dan pelatihan ditargetkan meningkat menjadi 30%.

Selama lima tahun terakhir layanan pendidikan kecakapan hidup melalui kursus dan pelatihan mengalami peningkatan secara terus menerus.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan” pada tahun 2021 tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan bahkan capaian kinerjanya melebihi target. Tingkat capaian IKU ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran penduduk usia produktif dengan memberikan pendidikan-keterampilan kepada masyarakat yang menganggur, usia produktif, tidak bersekolah, dan dari golongan ekonomi tidak mampu (miskin). Diharapkan dari program ini masyarakat dari kriteria tersebut memiliki keterampilan sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja atau usaha mandiri.

c). Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa. Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa merupakan sasaran strategis untuk mendukung tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU “Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa”. Sesuai dengan target rencana strategis 2018-2023, pada tahun 2021 penduduk tuna aksara usia dewasa ditargetkan menurun menjadi 99,02%. Dari target tersebut telah berhasil diturunkan menjadi sebesar 0.25%. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa pada tahun 2021 telah berhasil dicapai, bahkan capaiannya melebihi target yang ditetapkan.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

Program pendidikan dasar diarahkan untuk mendorong pemenuhan ketersediaan dan akses bagi layanan pendidikan dasar yang semakin luas tanpa adanya diskriminasi serta terus menerus melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan tingkat dasar.

Program pendidikan dasar dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Pendidikan yang ketiga yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan dasar. Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja yang ada dalam program pendidikan dasar.

a. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Dasar

Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar merupakan sasaran strategis untuk mendukung terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU “APM SD/SDLB/Paket A” dan IKU “APK SMP/SMPLB/Paket B”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

* + 1. IKU “APM SD/SDLB/Paket A” jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2021 IKU ini berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 93% dan terealisasi sebesar 95,41% dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,59%. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SD/SDLB/MI/Paket A adalah sebesar 95,41%. jumlah penduduk usia 7-12 tahun mencapai 26.216 sedangkan siswa usia 7-12 tahun mencapai 26.396. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 0,93%, sementara jumlah siswa usia tersebut kenaikan sebesar 0,95%. Pencapaian target IKU APM SD/SDLB/Paket A dilakukan melalui Program Indonesia Pinter (PIP) sebanyak 12.544 siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 26.216 siswa, rehabilitasi jamban SD sebanyak 128 ruang. Selain itu dilakukan pula pembangunan ruang guru Sekolah sebanyak 10 unit.

Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar juga didukung dengan menurunnya Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah. Pada tahun 2021, peserta didik SD/SDLB yang putus sekolah sebesar 0,03%. Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SD yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua. Untuk menurunkan angka putus sekolah pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pinter (PIP), program paket A dan B.

Untuk angka Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan pada tahun 2021 mencapai 99,96%. Capaian tersebut lebih rendah dari persentase yang ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2021 Jumlah lulusan SD/SDLB/Paket A sebanyak 4518 siswa. Jumlah lulusan SD/SDLB/Paket A yang melanjutkan ke SMP sebanyak 4518 siswa (100%)

Sehingga jumlah lulusan SD/SDLB/Paket A yang melanjutkan sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 99,98%. Dengan demikian lulusan SD/SDLB/Paket A yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs dan sederajat. Dengan memperhatikan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar berdasarkan standar pelayanan minimal berjumlah 32 siswa, maka untuk menampung semua lulusan SD/SDLB/Paket A diperlukan 163 ruang kelas, sementara itu ruang kelas yang tersedia 154 ruang, sehingga dibutuhkan penambahan ruang kelas baru sebanyak 6 ruang.

2. IKU “APK SMP/SMPLB/Paket B” jika bandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2021 tingkat capaian IKU ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, baru berhasil terealisasi sebesar 98,99%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,99%. Pencapaian APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 98,99% tersebut berkat dukungan dan kontribusi dari baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dinas Pendidikan memberikan kontribusi melalui program perluasan akses pendidikan pada jenjang/setara SMP. Indikator kinerja pendukung upaya meningkatkan APK tersebut dilakukan melalui pembangunan Ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP 1 ruang, Rehabilitasi Ruang Belajar SMP 3 Sekolah, Pembangunan Toilet (jamban) 2 (paket), Rehabilitasi Toilet (Jamban) sekolah 4 ruang dan rehabilitasi ruang perpustakaan 1 ruang. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin sebanyak 6.367 siswa. Berikut tren pencapaian angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/Paket B selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sesuai target rencana strategis Dinas Pendidikan 2018-2023, pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB/Paket B ditargetkan sebesar 100%. Dari target tersebut pada tahun 2021 baru berhasil tercapai sebesar 98,99%. Dengan melihat data kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama periode perencanaan 2018-2023 target IKU angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/Paket B belum mencapai target yang ditetapkan. Selain APK, indikator lain yang digunakan untuk mengukur ketersediaan akses layanan pendidikan dasar adalah Angka Partisipasi Murni. Untuk tahun 2021 “APM SMP/SMPLB/Paket B” adalah sebesar 78,88%. Beberapa intervensi yang dilakukan Pendidikan dalam meningkatkan APM, antara lain melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM-SMP) PIP sebanyak 2.930 siswa, bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 13.361 siswa, Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah pada tahun 2021 sebesar 0,003% dari target yang ditetapkan sebesar 0,004%. Jumlah siswa SMP/SMPLB/Paket B tahun 2021 adalah 13.361 siswa, sedangkan peserta didik yang putus sekolah adalah 57 siswa. Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SMP yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua meskipun Pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain:

 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), program paket B. Angka putus sekolah peserta didik SMP/SMPLB selama lima tahun terakhir mengalami penurunan secara terus menerus, dari 0.06% pada tahun 2017, menurun menjadi 0.05%, turun menjadi 0.04%, turun menjadi 0.03%, dalam turun menjadi 0.01% pada tahun 2021.

Persentase lulusan SMP/SMPLB melanjutkan ke sekolah menengah pada tahun 2021 telah mencapai 99,88%. Pada tahun 2021 Jumlah lulusan SMP/SMPLB/Paket B sebanyak 4.455 siswa. Jumlah lulusan SMP/SMPLB/Paket B yang melanjutkan ke SMA/SMK sebanyak 4.455 siswa. Masih adanya lulusan SMP/SMPLB/Paket B yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK disebabkan antara lain; adalah faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa lulusan SMP/SMPLB/Paket B yang tidak melanjutkan sekolah dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua.

Melihat capaian-capaian indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 atau periode akhir perencanaan 2018-2023 sasaran strategis meningkatnya akses layanan pendidikan dasar yang ditetapkan telah tercapai.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran

strategis meningkatnya akses layanan pendidikan dasar antara lain:

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah;

2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin (Program Indonesia Pinter);

3. Pemberian Beasiswa Bakat dan Prestasi;

4. Penambahan Ruang Kelas baru;

5. Pembangunan Ruang UKS

6. Pembangunan Toilet (jamban)

6. Rehabilitasi ruang kelas.

7. Rehabilitasi Jamban (toilet)

d). Meningkatnya Kualitas Guru Pendidikan Dasar

Meningkatnya kualitas guru pendidikan dasar merupakan sasaran strategis untuk mendukung terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 Tentang guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU :

1. Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4;

2. Persentase guru SMP/SMPLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4; IKU “Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4”, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2021 tingkat capaiannya mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 70%, berhasil terealisasi sebesar 80,20%, dengan persentase capaian sebesar 114,57%. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021 telah tercapainya target persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4 dikarenakan kuota jumlah guru yang mendapat tunjangan kualifikasi tidak dapat menjangkau keseluruhan jumlah guru yang belum S1/D4.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran

strategis meningkatkan kualitas guru pendidikan dasar antara lain:

1. Tunjangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

2. Tunjangan fungsional;

3. Pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

4. Fasilitasi peningkatan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.

* + - * 1. **REALISASI ANGGARAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | **PROGRAM / KEGIATAN** | **JUMLAH** **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **283.350.647.300** | 276.902.083.865 | 97,72% |
| 2 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **46.328.186.977** | 46.290.372.246 | 99,92% |
| 3 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | - | - |   |
| 4 | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **6.629.995.559** | 6.628.706.560 | 99,98% |
| 5 | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**  | **19.972.850** | 19.972.850 | 100,00% |
|   |  | **336.328.802.686** | **329.841.135.521** | **98,07%** |

# BAB IV

**PENUTUP**

I. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas pendidikan untuk Periode Januari s/d Desember 2021 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dengan demikian, pelaporan LKJIP ini merupakan sarana bagi Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan seperti telah dijelaskan sebelumnya memang banyak menghadapi kendala dan tantangan, baik disebabkan oleh karena perencanaan yang kurang efektif dan efisien, maupun keterbatasan anggaran di tahun 2021 khusus untuk sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi khusus (DAK). Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya target capaian kinerja pada setiap sasaran. Dan apabila dihubungkan dengan target capaian kinerja berdasarkan rencana strategis 2018-2023, sangat disadari masih banyak target-target sasaran yang belum tercapai secara maksimal yang tentu pada periode Rencana Strategis 2018-2023 harus menjadi perhatian serius.

II. TINJAUAN KHUSUS

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapain sasaran seperti diuraikan dalam BAB sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa pada periode anggaran 2021 dikategorikan Berhasil. Karena dari 14 sasaran yang direncanakan, 5 sasaran telah mencapai ketegori berhasil (Nilai 96 %- 100%), atau 35,71% sasaran, dan 9 sasaran yang dikategorikan Sangat Berhasil atau 64,3% sasaran. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja Dinas pendidikan peningkatan berdasarkan perhitungan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai bahwa ditahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,92% dari tahun 2019 yang sebesar 80,26%. Sementara di tahun 2021 realisasi capaian kinerja adalah sebesar 93,54%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ditahun 2021 Dinas pendidikan mengalami peningkatan realisasi kinerja berdasarkan sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan 2021.

Disadari masih terdapat sasaran-sasaran yang belum maksimal pencapaiannya. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius untuk tahun anggaran berikutnya sekaligus untuk periode perencanaan jangka menegah selanjutnya 2018-2023. Perhatian serius pula harus dilakukan pada sasaran-sasaran yang belum dilaksanakan dari rencana strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023, yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKT tahun – tahun selanjutnya.

III. TINDAK LANJUT

Setelah menganalisa sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategis 2018-2023, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam tingkat pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa akan kembali merencanakaanya pada Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang tentunya akan disinkronkan dengan visi dan misi daerah 2018-2023 dan kebijakan anggaran kementrian pendidikan dan kebudayaan sesuai rencana strategis kementrian.

Penetapan sasaran dan indikator yang lebih rasional, terukur, efektif dan efisien dalam penganggaran harus menjadi tolak ukur penyusunan rencana kerja tahunan untuk tahun 2021 sekaligus menjadi target perencanaan strategis periode 2018-2023.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2021, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sesuai tugas dan fungsinya yang diemban.

**Lampiran**

**TARGET KINERJA**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target |
| 1 | 1. Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan              | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 85,5% |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,85 |
| Angka Harapan Sekolah | 12,30 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,04 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,06 |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 99,9 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 99,9 |
| Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A | 93% |
| Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 60% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A | 95% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 93% |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 93% |
| 2.   Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 60% |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 1:31 |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | 1:16 |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar di PerKabupatenan | 1:16 |
| Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | 1,45 |
| Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | 148,54 |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 86% |
| 3.   Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan tersedianya kurikulum yang andal | Sekolah PAUD kondisi bangunan baik | 65% |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 70,25 |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | 82% |
| Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 95,87 |
| 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah | Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | 90% |
| Cakupan Perangkat Daerah Melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang mewujudkan SPM | 6 |
| Tingkat Kemiskinan | 7,15  |
| Cakupan perwujudan SPM bidang pendidikan | 100% |

**PENGKURAN KINERJA**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | % |
| 1 | 1. Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan              | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 85,50% | 63,81 | 74.63% |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,85 | 99,89 | 100% |
| Angka Harapan Sekolah | 12,3 | 13,97 | 114% |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,04 | 0,04 | 100% |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,06 | 0,06 | 100% |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 99,89 | 100% |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 99,89 | 100% |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 99,9 | 99,89 | 100% |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 99,9 | 99,86 | 100% |
| Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A | 93% | 95% | 103% |
| Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 60% | 79% | 131% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A | 95% | 101% | 106% |
| Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 93% | 99% | 106% |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 93% | 95% | 103% |
| 2.   Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 60% | 79% | 131% |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 01:31 | 01:31 | 100% |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | 01:16 | 01:16 | 100% |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar di PerKabupatenan | 01:16 | 01:16 | 100% |
| Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | 1,45 | 1,45 | 100% |
| Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | 148,54 | 148,54 | 100% |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 86% | 75% | 87% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.   Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan tersedianya kurikulum yang andal | Sekolah PAUD kondisi bangunan baik | 65% | 65% | 100% |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 70,25 | 65,25 | 93% |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | 82% | 82% | 100% |
| Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 95,87 | 95,87 | 100% |
| 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah | Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | 90% | 90% | 100% |
| Cakupan Perangkat Daerah Melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang mewujudkan SPM | 6 | 6 | 100% |
| Tingkat Kemiskinan | 7,15 | 7,15 | 100% |
| Cakupan perwujudan SPM bidang pendidikan | 100% | 100% | 100% |

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MINAHASA,

**HANSJE T. WUWUNGAN, S.Pd, MM**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19661112199103 1 014